

HUBUNGAN TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERSENTASE KEMISKINAN PADA PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 – TAHUN 2018

Relationship Of Regional Financial Ability Levels And Poverty Percentage To Economic Growth Of West Sulawesi Province, 2013 - 2018

Taufik Hidayat B Tahawa

Email : taufikhidayat@unsulbar.ac.id

Prodi Akuntansi, Universitas Sulawesi Barat

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Baurung, Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412

Riady Ibnu Khaldun

Email : riadyibnu@unsulbar.ac.id

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Sulawesi Barat

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Baurung, Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412

ABSTRAK

Kemampuan keuangan daerah, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di era saat ini ialah salah satu dari beberapa tujuan pencapaian otonomi daerah. Kajian penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kemampuan keuangan daerah yang diukur dari kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal serta tingkat kemiskinan pada pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan rentang tahun 2013 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan *ordinary least squares* (OLS) untuk analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Dampak dari penelitian menunjukkan perspektif kemandirian keuangan daerah, terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan keuangan daerah dengan tingkat kemiskinan dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari sisi desentralisasi fiskal terhadap kapasitas keuangan daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

Regional financial capacity, poverty levels and economic growth in the current era are among the goals of achieving regional autonomy. This research study aims to analyze the relationship between regional financial capacity as measured by regional independence and fiscal decentralization and the level of poverty in economic growth from 2013 to 2018 in Central Sulawesi Province. This study uses secondary time series data spanning 2013 to 2018. This study uses Ordinary Least Squares (OLS) for multiple regression analysis with the help of the SPSS application. The impact of the research shows that the perspective of regional financial independence, there is a significant relationship between regional financial capacity and poverty

levels in economic growth. Meanwhile, in terms of fiscal decentralization on regional financial capacity does not have a significant impact on economic growth.

Keywords: *Regional Financial Capacity, Regional Financial Independence, Poverty Level, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Tuntutan zaman global saat ini, pertumbuhan dan perkembangan dalam segala hal merupakan tuntutan yang sangat diseluruh Negara terkhusus untuk Negara berkembang. Indonesia yang berstatus sebagai Negara berkembang, diuntut untuk melakukan perkembangan dan pertumbuhan pada muti aspek secepat dan secepat mungkin, sehingga dapat bersaing dengan Negara Negara lain nya. pertumbuhan ekonomi ialah salah satu aspek yang sangat dituntut untuk terus meningkat setiap priodenya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses fruktuasi kondisi ekonomi dalam suatu wilayah secara terus menerus pada kurun waktu tertentu untuk mencapai kondisi yang lebih baik (Yasin, 2020). Saat ini, Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh banyak faktor, antara lain proporsi pengeluaran untuk pembangunan, pembangunan sarana dan prasarana umum, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas suatu negara secara keseluruhan.

Berdasarkan laporan perekonomian Indonesia tahun 2019 yang di terbitkan oleh BPS September 2019, Pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara pada 2019 diperkirakan melambat seiring penurunan ekonomi di Tiongkok. Perlambatan kinerja perdagangan dunia menekan investasi dan prospek ekspor di kawasan ASEAN. Penurunan ekspor terjadi karena negara-negara berkembang memasok produk industri manufaktur ke raksasa ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok sehingga perlambatan ekonomi di kedua ini membawa dampak luas bagi negara-negara berkembang lainnya. Khusus untuk Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 bertumbuh sebesar 5,02 persen dan nilai tersebut berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen. fenomena penurunan yang terjadi ini, mungkin saja bisa kaitkan dengan kemampuan keuangan di daerah yang masih belum efektif dan ketimpangan yang terjadi.

Pertumbuhan dari sisi ekonomi di suatu Negara, tidak terlepas dari kontribusi perekonomian yang berasal dari pengolahan potensi dan sumber sumber ekonomi di daerah tersebut. Estimasi pendapatan disuatu wilayah dengan wilayah lainnya sangatlah bervariasi. Hal ini diakibatkan oleh beberapa factor seperti faktor ekonomi, Kependudukan, etnis, dan lingkungan yang berbeda-beda. Pengolahan potensi pendapatan daerah merupakan bagian dari

konsep otonomi daerah yang menekankan pada pengolahan potensi berbasis kemandirian daerah tersebut. Kesuksesan program otonomi daerah tergantung bagaimana kemampuan daerah dalam mengefektifkan pengelolaan keuangan (Alvianto et al., n.d.). Oleh sebab itu, pengelola pemerintahan mampu mengembangkan potensi daerah di semua aspek serta menggali sumber-sumber pendanaan yang ada maupun yang potensial sehingga memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Mekanisme pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah mengutamakan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu daerah otonom.

Kemampuan keuangan khususnya di daerah telah tertuang dalam dokumen Anggaran pendapatan Belanja Daerah yang mencerminkan kekuatan pemerintah dalam mendanai proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah otonom (Akmalia, 2020). Kemampuan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang sangat membantu pada proses pendanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan kemasayarakatan (Kamaroellah, 2017). Pemerintah diwajibkan untuk mengorganisir roda pemerintahan sesuai dengan prinsip efektif dan efisien, yang nantinya akan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan proses pengembangan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Elemen dari kinerja keuangan daerah dapat dilihat dan diukur berdasarkan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio aktivitas, rasio efektivitas PAD dan rasio keserasian belanja (Candra et al., n.d.).

Penelitian ini akan melihat kemampuan keuangan daerah berdasarkan derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian finansial suatu daerah bergantung pada seberapa besar peningkatan penerimaan yang dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sumber lain (seperti bantuan atau pinjaman pemerintah pusat) (Gaghana et al., 2019). Sedangkan desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai desentralisasi kewenangan fiskal kepada pemerintah pusat oleh pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan, dan desentralisasi kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana kekuasaan. Desentralisasi fiskal menjadi sangat penting karena akan berdampak positif yaitu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari segi fiskal. Namun, desentralisasi fiskal mungkin berdampak negatif, yaitu meningkatnya korupsi, penyelewengan penggunaan uang Negara dan masih banyak lainnya. Sehingga, akuntabilitas di pemerintah daerah perlu diperkuat (Rasmini & Masdiantini, 2018). Sedangkan variabel Kemiskinan diukur dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok yang dilihat dari sisi pengeluaran (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017).

Kebijakan otonomi daerah, kebijakan derajat desentralisasi, faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas pendapatan dan belanja menjadi acuan utama dalam melihat persentase keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya kemandirian pengelolaan keuangan dan pengendalian tingkat kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat mendorong pencapaian tujuan di tingkat daerah maupun nasional untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Sebuah studi yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas, berbagai studi Berdasarkan apa yang terjadi (Unsulbar et al., 2018). Penelitian ini mencakup kemampuan keuangan daerah yang di ukur dengan kemandirian keuangan, desentralisasi fiskal, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi barat kurun waktu 2013 – 2018. Data dalam penelitian ini ialah angka olahan yang berasal dari laporan realisasi anggaran (LRA) kabupaten di Provinsi Sulawesi barat, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan tingkat kemiskinan periode 2013 - 2018. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk analisis kuantitatif hasil penelitian ini. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji secara kuantitatif hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y) (Ghozali, 2011). variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, dan variabel bebas (X) adalah kemampuan keuangan daerah (kemandirian keuangan daerah (X1) dan desentralisasi fiskal (X2)) dan kemiskinan (X3).

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan pengujian *One Sample Kolmogorov - Smirnov Test*, dimana data terdistribusi secara wajar/normal apabila nilai *Asump Sig (2- tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari nilai *alpha* sebesar 0,05 atau 5%. Berlandaskan pengolahan data di temukan angka signifikan uji *Kolmogorov- Smirnov* sebesar 0,855 atau lebih besar dari *alpha* 0,05. Hasil membuktikan jika data terdistribusi normal. Ada pula hasil pengujian normalitas ini disajikan pada gambar berikut.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.90907043
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.584
Asymp. Sig. (2-tailed)		.885

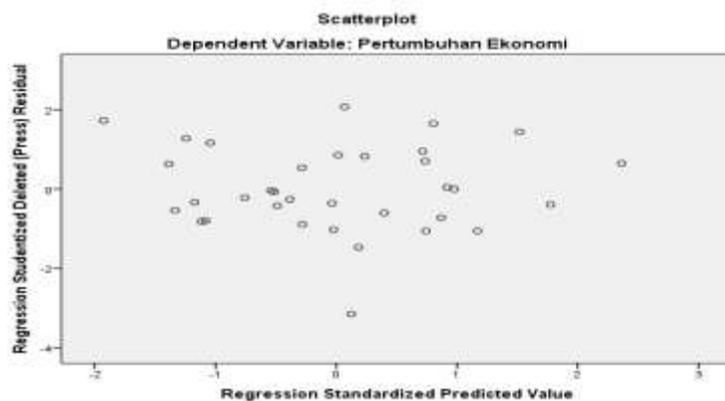
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Gambar 1

Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ketidak selarasan varians dari satu objek observasi pada model regresi yang di bangun. Pengujian dilihat dari grafik hubungan antara variabel dependen dan independen, nilai prediksi ZPRED dan residualnya (SRESID), sehingga dapat diketahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Pengujian ini dianggap sesuai apabila terjadi pola berbentuk seperti titik-titik yang membentuk pola beraturan, hal tersebut menandakan adanya ketidak samaan varians. Selain itu, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian ini disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2

Berdasarkan hasil pengolahan diatas, terlihat tidak adanya pola yang jelas atau beraturan pada sumbu Y, dan titik-titiknya tersebar diatas dan dibawah angka 0. Maka, dapat diketahui bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan menguji korelasi antara kesalahan perancu periode t dengan kesalahan perancu periode t-1 pada model regresi linier. Berikut Hasil uji autokorelasi pada gambar berikut

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.603 ^a	.364	.300	.95344111	.364	5.716	3	30	.003	1.432

a. Predictors: (Constant), Kemiskinan , Desentralisasi , Kemandirian
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 3

Seperti terlihat pada gambar di atas, nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah sebesar 1.432. Berdasarkan tabel *Durbin Watson* dengan menggunakan 36 sampel dengan signifikansi 5%, nilai dL sebesar 1,295 dan nilai dU sebesar 1,650, sehingga nilai 4-dL sebesar 2,705 dan nilai 4 - dU sebesar 2,350. Maka nilai $dL < DW < 4 - dL$ ($1.295 < 1.432 < 2.705$) dan diambil suatu kesimpulan tidak terjadi permasalahan autokorelasi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang dampak secara kuantitatif korelasi antara kapasitas keuangan daerah (kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal) dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil *output* dengan menggunakan program SPSS versi 21,0, terlihat hasil analisis regresi linear berganda pada gambar berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.603 ^a	.364	.300	.95344111	.364	5.716	3	30	.003	1.432

a. Predictors: (Constant), Kemiskinan , Desentralisasi , Kemandirian
 b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Gambar 4

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.464	.550		11.745	.000
	Kemandirian	.178	.077	.569	2.315	.028
	Desentralisasi	-.065	.101	-.156	-.638	.528
	Kemiskinan	-.083	.035	-.349	-2.371	.024

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tabel di atas diketahui nilai *R-squared* sebesar 0.300. Nilai 0.300 menunjukkan bahwa perubahan nilai variabel independen yaitu kapasitas keuangan daerah (kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal) dan kemiskinan berkontribusi sebesar 30,00% terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, sedangkan 70,00% sisanya merupakan variabel lain yang tidak terkaji dalam model penelitian ini. Sedangkan nilai koefisien korelasi atau *multiple R* ialah sebesar 0.603. Nilai 0.603 menunjukkan tingkat korelasi variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y) adalah sebesar 60.3 %. Nilai 60.3 % mengindikasikan terjadi hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel kemampuan keuangan daerah (kemandirian daerah dan desentralisasi fiskal) dan kemiskinan terhadap variabel Y yaitu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengolahan data kuantitatif dari tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 6.464 + 0,178 X_1 - 0,65 X_2 - 0,83 X_3$$

- Koefisien (b1) 0,178 dan bertanda positif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah (kemandirian daerah) (X1) senilai satu satuan, maka akan diikuti pula dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,178
- Koefisien regresi (b2) 0,65 dan bertanda negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan variabel kemampuan keuangan daerah (desentralisasi fiskal) (X2) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,65.
- Koefisien regresi (b3) 0,83 dan bertanda negatif . Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tingkat kemiskinan (X3) sebesar satu satuan, maka diikuti pula dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,83.

Berdasarkan hasil persamaan regresi dengan perhitungan statistik, dapat disimpulkan hasil uji-t sebagai berikut

- Variabel X1 diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,315 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,688 dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%. Hasil ini mengindikasikan terdapat

hubungan antara variabel kemampuan keuangan daerah (tingkat kemandirian keuangan daerah) (X1) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

- Variabel (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,638 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,688 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5%. Hasil ini mengindikasikan tidak terdapat pengaruh antara variabel kemampuan keuangan daerah (desentralisasi fiskal) (X2) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
- Variabel (X3) diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,371 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,688 dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%. Hasil ini mengindikasikan terdapat pengaruh antara tingkat kemiskinan (X3) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Dari hasil uji statistic penelitian diatas diketahui bahwa terdapat korelasi antara variabel derajat kemandirian keuangan daerah dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Kemandirian finansial sendiri menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kemampuan untuk mendanai secara mandiri kegiatan operasional pemerintah, pembangunan infrastruktur dan proses pengabdian kepada masyarakat, kegiatan tersebut membantu pembayaran pajak, pajak dan pendapatan lainnya serta menjadi sumber pendapatan yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. (Tahar & Zakhya, 2011). Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan, mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maka sangat perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah yang mandiri. Jika pendapatan daerah selama periode laporan lebih tinggi, maka proporsi dana jasa konstruksi juga lebih tinggi (Ani & Dwirandra, 2014). Sehingga kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan akan cenderung meningkatkan proses pelayanan pada masyarakat. Apabila hal ini dilakukan berdasarkan asas efektif dan efisien secara bekal, maka akan memicu kemandirian dalam proses pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip otonomi. Hasil penelitian diatas juga mengindikasikan bahwa dengan tingkat kemandirian yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat memiliki otorisasi penuh dalam mengefektifkan dan memaksimalkan sumber sumber pendapatan keuangan yang ada di daerahnya. Dengan maksimalnya pengolahan sumber keuangannya maka akan meningkatkan produktifitas daerah dan secara tidak langsung akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil di atas juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi dapat menjelaskan dan menyiratkan kemampuan

dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih baik dan lebih terarah untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (Kharisma, 2013). Fokus desentralisasi fiskal adalah kekuasaan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal juga merupakan bagian dari pengalihan fungsi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat lokal atau daerah untuk meningkatkan produktivitas dan peredaran uang di daerahnya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal hanya secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil di atas pula menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara makna, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan utama dan mendasar dalam pengentasan kemiskinan di daerah (Nizar et al., 2013). Kemiskinan yang semakin besar akan menyebabkan biaya pembangunan menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat proses pembangunan ekonomi (Novriansyah, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, dari tahun 2013 hingga 2018, variabel kapasitas keuangan daerah (kemandirian keuangan daerah) dan kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat memiliki signifikansi statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013. Sampai 2018. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Semakin banyak variabel yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, semakin banyak referensi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menilai kemajuan Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmalia, J. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sijunjung*.
- Alvianto, F., Amir, A. M., & Fattah, V. Y. (n.d.). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sigi Sebagai Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran. *Katalogis*, 6(7), 127–134.
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi*

Universitas Udayana, 6(3), 481–497.

- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. n.d.. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 146–159.
- Gaghana, R. L., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon Dan Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Ghozali, I. 2011. Application of multivariate analysis with SPSS program. *Semarang: Diponegoro University Publishing Agency*.
- Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123–138.
- Kharisma, B. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. 2013. Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN*, 2302, 172.
- Novriansyah, M. A. 2018. Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59–73.
- Rasmini, N. K., & Masdiantini, P. R. 2018. Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability Of Local Government And Audit Opinion. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 124.
- Tahar, A., & Zakhiya, M. 2011. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(1), 88–99.
- Unsulbar, A. J., Purwati, W., & Dahlia, D. 2018. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Guru Rambate Rata (KGRR) Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(1), 1–14.
- Yasin, M. 2020. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27–31.